

# KONSEP E-GOVERNMENT DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI PEKON BLITAREJO KABUPATEN PRINGSEWU

Bertha Suri

*Jurusan Sistem Informasi STMIK Pringsewu Lampung*

*Jl. Wisma Rini No. 09 pringsewu Lampung*

*website: www.stmikpringsewu.ac.id*

*E-mail :Berthasuri29@yahoo.com*

## ABSTRAK

*Pemerintah daerah telah banyak melakukan berbagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pekon Blitarejo selama otonomi daerah berlangsung. Salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pekon atau e-government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e-government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Dari pengamatan selama ini, beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan e-governmentnya cukup baik, namun beberapa daerah lain baru memahami penerapan e-government hanyalah sebatas membangun website. Bahkan website yang ada pun jauh dari kesan informatif. Tulisan ini mencoba mendiskripsikan pekon. Pertama, potret dari beberapa pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupaten atau kota yang dianggap berhasil meningkatkan pelayanan di pekon melalui pemanfaatan teknologi informasi atau e-government., faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengembangan e-government dalam mendukung Peningkatan Pelayanan Pekon di Era Otonomi Daerah dan upaya kedepannya. Belajar dari beberapa pemda yang telah berhasil meningkatkan pelayanan pekon melalui pemanfaatan TI.*

*Kata Kunci: e-government, pelayanan masyarakat, pemerintah daerah*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Desa merupakan bagian terkecil dari negara Republik Indonesia, dimana pembagian kekuasaan tak hanya dilaksanakan secara horizontal, namun juga secara vertikal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab yang lebih luas dan leluasa dalam mengupayakan kesejahteraan daerahnya. Semenjak itu pula, berbagai dinamika terjadi dalam penyelenggaraannya baik dari aspek politik, ekonomi, maupun administrasi negara. Pelayanan pekon misalnya, menjadi isu terpenting karena secara teoritis, rentang kendali yang lebih pendek membuat pelayanan pekon menjadi lebih prima. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pekon, salah satunya adalah mengaplikasikan berbagai teknologi

informasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan pekon atau e-government. Sejak terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, berbagai Instansi Pemerintah termasuk pemerintah daerah mulai mengadopsi e-government tersebut dengan berbagai metode dan tahapan. Untuk mendukung upaya ini, pihak pekon pun menyelenggarakan E-Government Award, misalnya pemberian Penghargaan E-government Award oleh Majalah Warta Ekonomi yang telah dilakukan sejak Tahun 2002 (Tabel 1). Dukungan ini pada dasarnya sebagai bentuk apresiasi pekon terhadap pemda yang serius menerapkan e-government. Dari pengamatan selama ini, beberapa daerah menunjukkan kinerja pengembangan e-

*governmentnya* cukup baik, namun beberapa daerah lain baru memahami penerapan *e-government* hanyalah sebatas membangun website. Bahkan website yang adapun jauh dari kesan informatif.

### 1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang penelitian ini yang telah dipaparkan di atas, maka sebagai permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh E-Government terhadap pelayanan pada Pekon Blitarejo
2. Apakah manfaat dari penerapan E-Government pada Pekon Blitarejo

### 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, maka dengan ini penelitian membatasi penelitian ini pada ide atau pemakaian dalam rancangan penerapan E-Government pada Pekon Blitarejo dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah bagi Pekon Blitarejo dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memberikan layanan informasi mengenai pekon secara efisien kepada masyarakat.

### 1.4 Manfaat

1. Manfaat penelitian ini sebagai sarana pengetahuan bagi penulis dan untuk memberikan suatu kemudahan dalam segala proses yang berhubungan dengan sistem informasi Pekon Blitarejo
2. Memudahkan petugas untuk mengetahui tingkat pelayanan Pekon Blitarejo.

## 2 LANDASAN TEORI

### 2.1 Definisi Sistem

Menurut Davis, (2008:24) Sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen sub sistem yang saling bekerjasama atau dihubungkan dengan cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk

melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan.

### 2.2 Definisi Informasi

Menurut Nugroho, (2006: 42), “ Informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang dipertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan” .

### 2.3 Definisi Sistem Informasi

‘Sistem informasi adalah sekumpulan elemen yang bekerja secara bersama-sama baik secara manual maupun berbasis komputer dalam melaksanakan pengolahan data yang berupa pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data untuk menghasilkan informasi yang bermakna dan berguna bagi proses pengambilan keputusan.

### 2.4 Definisi Pekon

Menurut Sutarjo Kartohadikusumo (1965) Pekon merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri merupakan pemerintah terendah dibawah camat .

### 2.5 Definisi Pelayanan Masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah dapat diartikan melayani kepentingan masyarakat umum dalam sebuah negara. Pelayanan masyarakat artinya memberikan pelayanan (melayani) keperluan masyarakat umum dalam sebuah negara (The Liang Gie 1997:15).

### 2.6 Definisi E-Government

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan E-Government sebagai berikut: E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti internet dan komputer mobile yang mempunyai kemampuan mentransformasikan hubungan dengan

rakyat, kelompok bisnis, dan aparatur pemerintah.

Menurut Saylendra (2008) dalam tulisan yang berjudul implementasi E-Government, menyatakan bahwa E-Government adalah sistem informasi manajemen berbasis elektronik untuk membantu pemerintah dalam menyediakan informasi, memberikan layanan umum dan memungkinkan adanya transaksi secara online baik ke badan perusahaan lain maupun dengan masyarakat dengan kualitas yang baik

Sedangkan pengertian yang lain pemahaman E-Government ini bisa dilihat bahwa inti dari E-Government adalah pengaplikasian teknologi informasi dan komunikasi untuk melayani warga negara, termasuk pelaku bisnis dengan lebih baik, cepat dan mudah yang disertai dengan penggunaan prinsip-prinsip bisnis, yaitu efisiensi dan efektifitas yang berorientasi kepada kepuasan warga negara dan pihak-pihak lainnya (kumar 2007 dan Monga 2008).

### 2.7 Definisi Website

Menurut Yuhefizar (2009:9) mengatakan bahwa 'website adalah suatu metode untuk menampilkan informasi di internet baik berupa teks, gambar, suara, maupun video yang interaktif dan mempunyai kelebihan untuk menghubungkan (link) satu dokumen dengan dokumen lainnya (hipertect) yang dapat diakses melalui sebuah brows'.

Sedangkan menurut Kadir (2008:376) mengatakan bahwa ' istilah website ( situs website) menyatakan lokasi dari mana domain website, sedangkan informasi terdapat pada web disebut halaman website (web page) dan untuk mengakses sebuah halaman website dari browser pemakai perlu menyebutkan URL (Uniform Resouce Locator), setiap situs mempunyai homepage yaitu sebuah halaman utama bagi sebuah situs yang mengaitkan dengan halaman-halaman web lain.

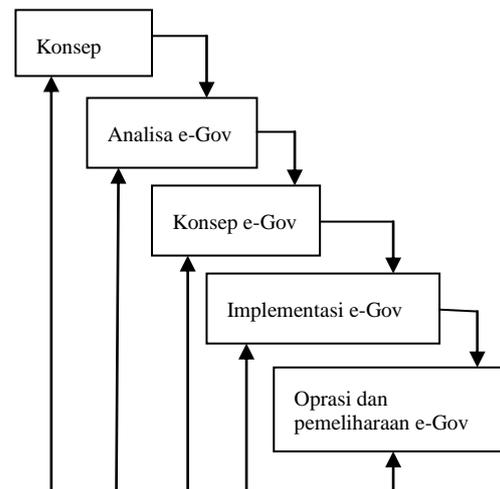
## 3 KONSEP PERANCANGAN

### 3.1 Konsep E-Government

Menurut Eko Indrajit 2012 e-government merupakan sebuah konsep memiliki prinsip-prinsip dasar yang memiliki dasar yang Universal, tetapi pengertian maupun penerapannya pada suatu negara tidak dapat dipisahkan dari faktor-faktor sejarah budaya , pendidikan, pandangan politik kondisi ekonomi masing-masing negara

Jogianto (2007:23) mengatakan bahwa 'Metode waterfal merupakan suatu cara mengembangkan software yang fase-fasenya berurutan sebuah fase tidak bisa dikerjakan sebelum fase sebelumnya tidak selesai dikerjakan.

Berikut ini gambar waterfal

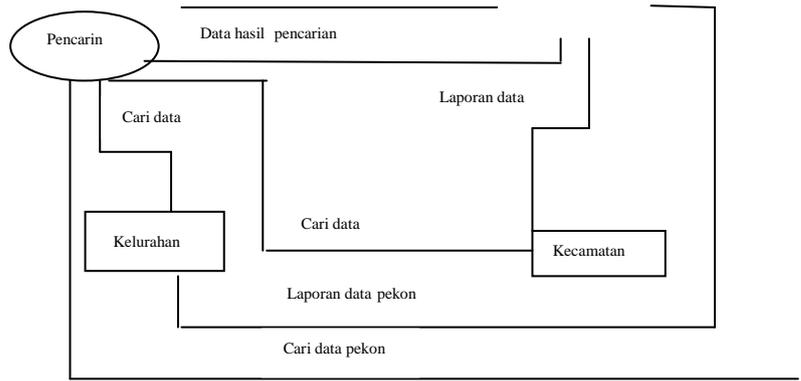


Gambar, konsep Waterfal

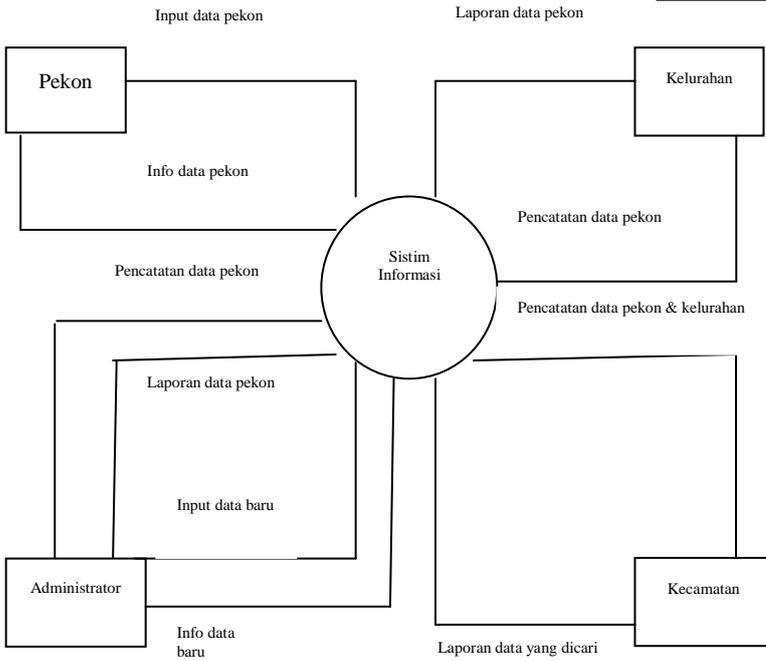
## 4 ANALISA PERANCANGAN

### 4.1 Diagram Konteks

Merupakan gambaran sistem secara garis besar di dalam suatu lingkungan dengan entitas luar. Lingkaran tersebut menggambarkan keseluruhan proses dalam sistem yang telah dirancang/



4.2 Gambar DFD level 0



Gambar 4.1 Diagram Konteks

**4.2 DFD lefel 0**

Data Flow Diagram (DFD) adalah suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi untuk menggambarkan arus dari data sistem, yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur dan jelas.

**4.3 Implementasi**

**4.4.1 Tampilan Login**

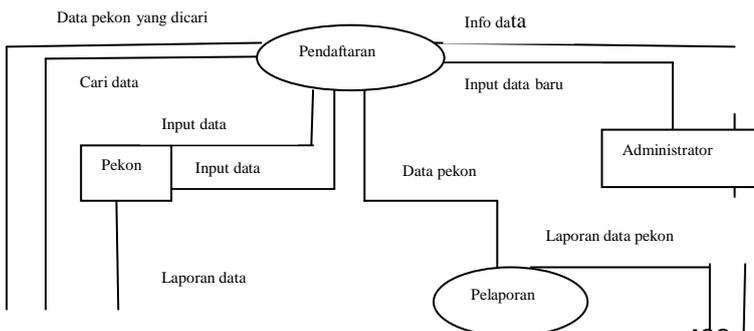


Gambar, 3.3.1 Login Admin

**4.4.2 Halaman Beranda**



Gambar, 4.4.2 Tampilan Halaman Beranda



## 5 PENUTUP

Perkembangan teknologi informasi harus senantiasa disikapi positif, khususnya dalam memberikan peningkatan pelayanan masyarakat di Pekon Blitarejo. Penerapan e-government diharapkan dapat mewujudkan tujuan tersebut dengan mendasarkan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, lebih cepat, dan lebih mudah. Dengan demikian pekon dapat mencapai efektivitas dan efisiensi dalam layanan atau kinerjanya.

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh, berkenaan dengan judul *E-Government* peningkatan pelayanan kepada masyarakat di Pekon Blitarejo Kabupaten Pringsewu maka.

1. Sangat besar pengaruh setelah menggunakan E-Government di Pekon Blitarejo
2. Memudahkan untuk mendapatkan informasi tentang pekon tanpa harus datang langsung

### 5.2 Saran

Dengan adanya E-Government diharapkan menjadi salah satu alternative atau trobosan baru dalam memberikan pelayanan masyarakat Pekon Blitarejo agar lebih baik serta menjadi sumber daya informasi utama bagi Pekon Blitarejo dalam rangka penyediaan informasi yang bersifat strategis, maka mendapatkan hasil yang belum maksimalnya penerapan/pelaksanaan *E-Government* yang berbasis situs *web* ini dikarenakan sumber daya manusia untuk mengelola *website* masih kurang, sarana dan prasarana atau jaringan internet yang kurang bagus, dan anggaran sehingga dalam penggunaan *E-Government* belum bisa dimanfaatkan dengan baik, dalam pengembangan *E-Government* yang berbasis *website*.

1. Perlu dievaluasi secara terus menerus sehingga diketahui bagaian mana saja yang tidak berjalan secara optimal

2. Perlu dilakukan update informasi setiap hari dikarenakan informasi di era ini berjalan pesat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwaruddin, Awang (2008). *Best Practices Keberhasilan e-leadership*. Diakses pada 29 April 2011 dari [http://www.e-capacity.building.info/ecb5/index.php?option=com\\_content&task=view&id=46&Itemid=53](http://www.e-capacity.building.info/ecb5/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=53).
- Djunaedi, Achmad. (2006). *Pengalaman Pengembangan Digital Government Services di Pemerintah Propinsi DIY*, Prosiding Konferensi Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi untuk Indonesia, ITB, Mei 2006, Bandung.
- Erizal, Roswiani, Ani (2009). *Pemanfaatan Model Strategic Alignment untuk Penentuan Layanan Unggulan Digital Government Service Bidang Kesehatan Pada Pemerintah Daerah Propinsi DIY*, Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, Juni 2009, Yogyakarta. Diakses pada 5 Juni 2010 dari <http://journal.uui.ac.id/index.php/Snati/article/viewFile/1215/1012>
- Kumrotomo, Wahyudi. (2008). *Pengembangan E-government untuk Peningkatan Transparansi Pelayanan Masyarakat : Studi Kasus UPIK di Pemkot Jogyakarta dan E-procurement di Pemkot Surabaya*. Makalah KAN Juni 2008 , UGM, Jogjakarta. Diakses pada 4 Agustus 2009, dari <http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wpcontent/uploads/2008/06/pengembangan-e-government-dalam-peningkatan-transparansi-pelayanan-Masyarakat.pdf>
- Sulianto, Budi. (2007). *Penerapan Egovernment di Kabupaten Sragen*. Diakses pada 10 Mei 2011, dari <http://fit.uui.ac.id/media/egovernmentkabupatensragen.pdf>.